

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM CSR DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Oleh:

Harsono Hadisuamardjo,

Prodi Administrasi Pendidikan

(e-mail : harsono.hadisumarjo@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendisain model implementasi bantuan CSR pendidikan yang efektif, melalui gambaran *assessment* CSR pendidikan, perencanaan, implementasi, pengendalian dan dampaknya. Program ini diselaraskan dengan program RJPM 2005-2025, meliputi empat hal penting yakni perbaikan di segala bidang, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya disusun model konseptual implementasi bantuan CSR pendidikan yang efektif di Kawasan Industri Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam yang ditentukan secara *purposive* dan *snowballing* dengan semua responden terpilih. Strategi yang digunakan adalah studi kasus, khususnya berkaitan dengan CSR pendidikan, juga dilakukan observasi, analisis dokumen, serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program CSR, kemudian disusunlah sintesanya. Program CSR pendidikan disalurkan oleh perusahaan besar seperti Indocement Heidelberg, Holcim, dan Bogasari Flour Mills. Sistem implementasi program antara lain pemberian beasiswa, praktek kerja industri, *study visit*, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan. Agar implementasi CSR pendidikan efektif disusun model konseptual CSR pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap. Diharapkan implementasi CSR pendidikan (formal dan informal) pada masa yang akan datang menjadi lebih berguna yang dapat meningkatkan citra pendidikan dan citra perusahaan.

Kata kunci: CSR Bidang Pendidikan, Efektivitas Implementasi Kebijakan, Kawasan Industri

ABSTRACT

School environment and their environmental operation industries are directly faced many problems and issues. So, it is necessary that government, industry, and schools are related to make an industrial agreement for improving education institution. Thus, the priorities of national development plans, as stated on the Repelita (Five years national planning) and RJPMN 2005-2025 (long term national planning), education was developed on the basis of 4 main strategies: the improvement of opportunity, quality improvement of quality of education, improvement of relevancy of education to development needs and improvement of efficiency in educational management. By dept interviewing to relevance participants in industrial estate was purposively and snowballing system. In this case, CSR for education program, was observed, analysis documents, synthesizing factors, then designed the model of effectively of the policy implementation. The CSR education is one of the most important donations for financing the implementation of the educational administration. Scholarships, infrastructure maintenance, laboratory device, practical and study visits are the priority program in the field of industrial estate. Both of institutions, educational administration and CSR, however, are needed each other, as a foundation support for sustainable education operation. This research was conducted in the area of Indocement Heidelberg Group, Holcim Group, and Bogasari Group, which has been committed for distributing the donation continually. This educational donation is aimed to help students to be able to develop attitude, knowledge, and skill, becoming to be effectively. The effect of the CSR implementation is to be many benefits for educational image and company image.

Keywords: CSR for Education, Effectiveness Implementation Policy, Industrial Estate

PENDAHULUAN

Kondisi pendidikan di kawasan industri saat ini sangat memprihatinkan. Sudah banyak pemukiman penduduk dan sekolah tergusur oleh pembangunan kawasan industri. Kebijakan pembuatan kawasan industri dapat menimbulkan masalah pada aspek lain, seperti alih fungsi lahan, berubahnya lokasi sekolah, pemukiman dan

perumahan, pertanian, dan lain-lain. Kawasan ini selalu memiliki resiko dan konsekuensi sebab muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara dunia industri dan dunia pendidikan. Konsekuensi ini harus ditanggung oleh pendidikan di kawasan industri, yang terkesan dengan kebisingan, berdebu, jauh dari pemukiman, dan

tidak nyaman. Satu sisi ekonomi, kawasan industri mempunyai manfaat bagi peningkatan pendapatan, di sisi lain adalah dapat menimbulkan masalah baru terutama masalah infrastruktur pendidikan. Dalam implementasi kebijakan inilah muncul permasalahan demi permasalahan, sehingga diperlukan kebijakan yang tidak merugikan.

Ambadar (2008) berpendapat CSR memiliki manfaat pada masyarakat sekitarnya, sekalipun maknanya belum jelas, hanya sekedar membantu pilar-pilar. Permasalahan timbul mengingat banyaknya perubahan status, lokasi sekolah dan lokasi pemukiman penduduk akan tergusur dan berpindah tempat. Akibat lainnya, ternyata merubah sistem lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, budaya, infrastruktur, pertanian, dan lain-lainnya. Salah satu yang terganggu adalah capaian standard pelayanan minimum bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun standard pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan masih menyisakan persoalan yang besar. SPM bidang pendidikan dimasukkan untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemerataan, keadilan, kemuliaan martabat manusia. Lokasi sekolah yang dibangun sudah seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, dan sistem penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan SPM pendidikan ini juga berlaku di kawasan industri, namun demikian pelayanan pendidikan di kawasan industri di tersebut masih jauh dari harapan, hal ini terjadi karena berbagai kepentingan.

Penyelenggaraan pendidikan di wilayah industri cukup unik, dan sewaktu-waktu mereka siap berpindah tempat, dan melakukan perubahan. Perubahan demografi wilayah ini adalah perubahan fungsi lahan, jumlah penduduk, jumlah sekolah, jumlah murid, konsentrasi pemukiman, dan perubahan sistem sosial dan budaya. Belum lagi dengan angkatan kerja yang datang ke kawasan industri sebagian besar bukan warga setempat, karena penduduk setempat berpendidikan rendah atau tidak lulus SD, sementara perusahaan menghendaki karyawan (buruhnya) dari orang-orang yang telah lulus SMK yang siap bekerja. Mereka berasal dari daerah lain yang lebih berpengalaman di bidangnya. Perubahan demografi yang demikian akan mengakibatkan dampak positif dan negative. Dengan demikian, *outcomes* dunia pendidikan dapat dirasakan langsung oleh dunia industri (dunia kerja), karena menjadi nilai masukan yang amat penting bagi penopang faktor ekonomi, baik secara mikro

maupun makro. Jadi pendidikan dan industri tak dapat dipisahkan, mengingat keduanya saling memerlukan dan mendukung. Penopang penting bagi dunia pendidikan adalah dari perusahaan di kawasan industri.

Menurut Rudito dan Femiola (2007) bahwa kawasan industri yang baru dibangun ini memang menimbulkan masalah pelik dan konflik di masyarakat. Perusahaan merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan (*corporate citizenship*), yang berhak atas kehidupannya. Keberadaan kawasan industri mengoptimalkan operasional perusahaan agar tetap terjaga, perusahaan tak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat tersebutnya, tidak mengganggu operasional pendidikan maupun perusahaan. Demikian adanya, antara perusahaan dan masyarakat adalah saling menjaga kepentingannya, dan yang lebih khusus lagi adalah penyelenggaraan pendidikan. Selama ini kebijakan industri dan pendidikan memang tidak sejalan. Pembangunan kawasan industri terus digalakkan, karena industrialisasi bukan saja merupakan proses perubahan struktur ekonomi, melainkan juga merupakan perubahan masyarakat, yaitu masyarakat industri dengan nilai-nilai sosial budayanya yang khas (Tilaar, 2012 : 138).

Menurut Rudito *et al.* (2004) masyarakat sekeliling dan pihak-pihak lain dapat terkena dampak dari aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perusahaan tidak dapat lepas dari kebergantungan pada pihak lain. Saat ini, pihak sekitar menghendaki agar perusahaan dan masyarakat menjaga keserasian. Cara menjaganya antara lain diperlukan kerjasama antar keduanya, sehingga tujuan dari masing-masing *stakeholders* dapat tercapai dengan baik, dan perusahaan akan dianggap penting pada sistem kemasyarakatan tersebut. Perhatian terhadap masyarakat tersebut dikenal sebagai tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kegiatan CSR ini bersifat sosial dan tidak mengikat. Bentuknya sebagai pilar-pilar atau sebagai penopang dan penyokong potensi masyarakat. Pilar-pilar ini akan bermanfaat baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Bagi dunia pendidikan, bantuan perusahaan jelas memiliki manfaat dan banyak kepentingannya.

Permasalahan utama yang terjadi di kawasan industri adalah masalah kependidikan, antara lain anak-anak harus memutar jauh untuk menuju ke lokasi sekolah, belum adanya sekolah yang bermutu atau setara dengan daerah lain, perlunya

bantuan pendidikan karena faktor ekonomi, belum transparannya bantuan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa. Bantuan diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih tinggi, kemudian lokasi ini sangat jarang ditemui gedung sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

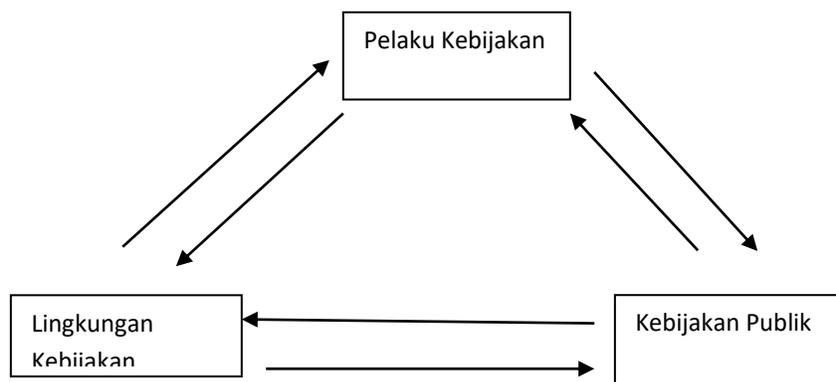
Fokus kajian adalah mengenai program CSR pendidikan yang terdapat di kawasan industri Bogor, melalui sistem assessment, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan kajian dampaknya. Bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan yang dimaksud adalah dalam bentuk program CSR pendidikan. CSR pendidikan yang dijadikan kajian ini antara lain implementasi praktek kerja, beasiswa, bantuan infrastruktur (fasilitas) sekolah, pelatihan, kunjungan (studi visit), dan lain-lain yang berkaitan dengan bantuan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut diselaraskan dengan visi dan misi pendidikan nasional, mengingat bahwa masalah pendidikan merupakan tugas kita semuanya. Rincian kajian meliputi,

- 1). Assessment dan perencanaan CSR pendidikan
- 2). Sistem implementasi, pengendalian, jenis dan sifat program CSR
- 3). Hasil yang diperoleh dan manfaat atas program, dan dampak
- 4). Masalah pendidikan yang dihadapi
- 5). Kebijakan pengembangan CSR pendidikan di masa mendatang .

Dalam mengkaji implementasi program CSR pendidikan diperlukan sekali grand theory dan supporting theory yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan kebutuhan masyarakat lingkungan industri. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai pengembangan masyarakat (*community development*) di kawasan industri, perspektif administrasi pendidikan terhadap CSR pendidikan.

Guna menelaah pentingnya *Corporate Social Responsibility* diperlukan secara luas tentang azas manfaat pelaksanaan program CSR bagi masyarakat di sekelilingnya. Dalam menentukan program tersebut Kotler (2004: 25) menggarisbawahi lima hal penting yakni perhatian penuh potensi internal dan eksternal, manfaat adanya potensi, tindakan yang baik bagi usahanya, kesadaran akan tindakan yang terus meningkat, dukungan terhadap perubahan perilaku. Guna mengimplementasikan program ini masing-masing institusi diharuskan memiliki langkah strategis antara lain tata kelola yang benar (*good governance*), memiliki struktur organisasi yang mantap, kepemimpinan yang berwawasan lingkungan, serta memiliki kemampuan kewirausahaan yang tinggi (Hitt dan Hoskisson, 2007: 288). Berkaitan dengan program CSR pendidikan, maka tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan, baik dari pimpinan sekolah (dunia pendidikan), pimpinan perusahaan, dan masyarakat sekelilingnya. Tentang perihal ini, Tilaar (2012 : 138-139) menggarisbawahi bahwa sistem pendidikan nasional di zaman industri modern saat ini sedang menghadapi krisis. Oleh karenanya perlu proses yang memadai. Proses menuju masyarakat industri yang bergerak dalam suatu jalinan beberapa poros transformasi penting yang mengubah dan memberi arah pada sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk pendidikan nasional.

Kebijakan CSR adalah kebijakan untuk publik dan bersifat umum dan terbuka. Sistem kebijakan ini adalah hubungan timbal balik antara tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Seperti yang tertera pada Gambar 2.1 tiga elemen sistem kebijakan yang saling terkait.

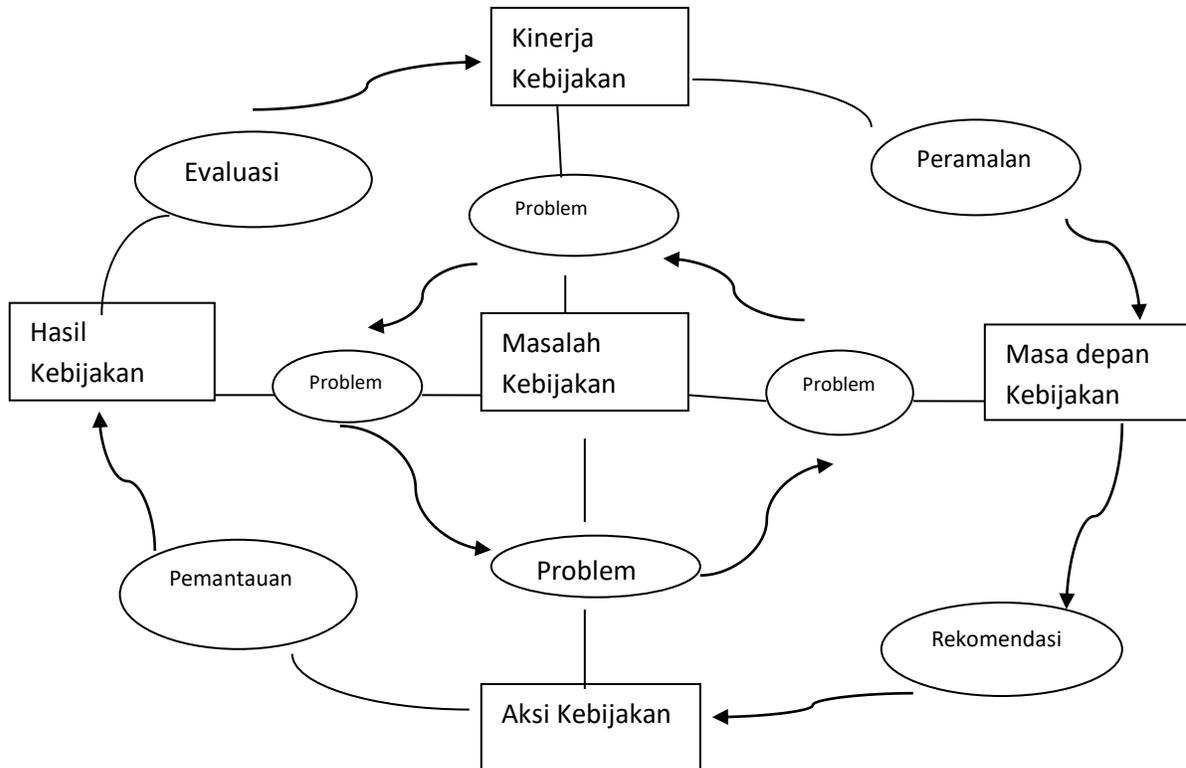


Gambar 2.1 : Tiga elemen dalam sistem kebijakan (Dunn, 2000: 110)

Penyelenggaraan pendidikan termasuk ke dalam kebijakan publik artinya bahwa masalah pendidikan diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Dalam konteks kebijakan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan selalu ditemukan banyak masalah, maka untuk mengetahui proses pengkajian masalah diperlukan metodologi analisis kebijakan. Kebijakan (Dunn, 2000: 3) ini sebagai perpaduan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu politik, psikologi, ekonomi, filsafat. Analisis

kebijakan bersifat deskriptif diambil dari disiplin-disiplin tradisional.

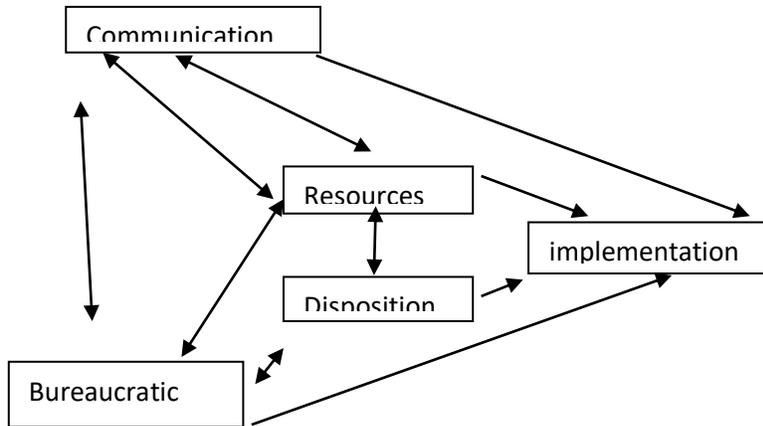
Mengacu pada Gambar 2.2 bahwa masa depan kebijakan memiliki konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai, dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan, yang mengilustrasikan kebijakan yang berorientasi masalah, berkaitan satu sama lain.



Gambar 2.2 : Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah (Dunn, 2000: 21)

Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah adalah sangat penting diketahui. Hal ini disebabkan informasi yang tidak memadai, yakni bila melihat masalah kebijakan yang telah dilaksanakan masa lalu yang tidak dapat

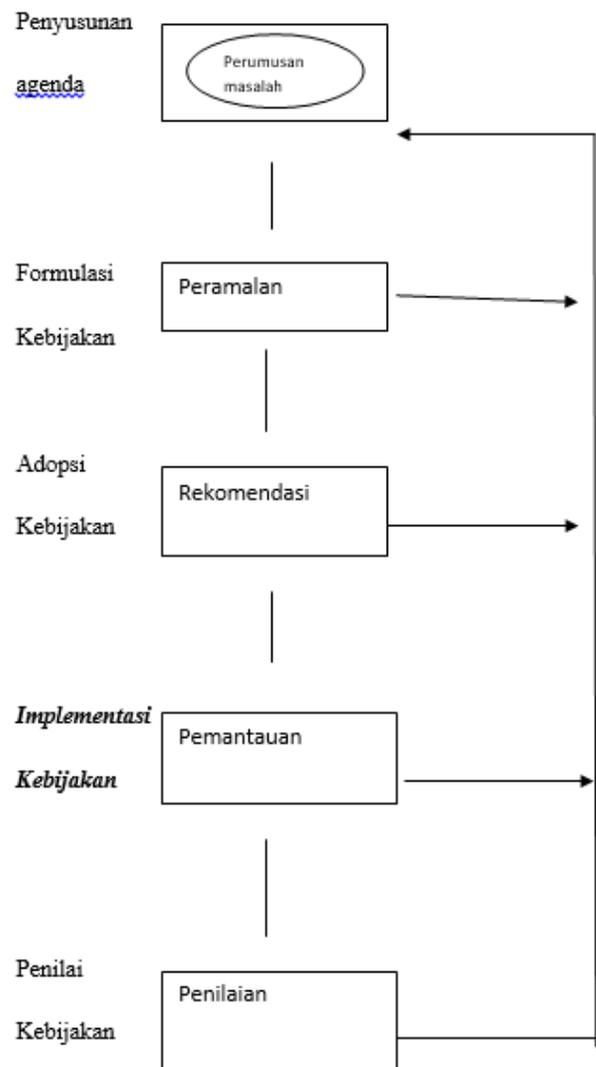
berubah, sedangkan nilai itu sendiri yang dapat berubah (Dunn, 2000: 10). Kebijakan program CSR perusahaan yang telah dilaksanakan sejak perusahaan berdiri, yakni jauh sebelum Undang-undang CSR dikeluarkan.



Gambar 2.3. Model implementasi kebijakan

Aksi kebijakan merupakan suatu gerakan atau serangkaian yang dituntun oleh alternative kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa mendatang, yang memiliki nilai. Sedangkan kinerja kebijakan akan terlihat sebagai derajat atau tingkatan dimana hasil kebijakan yang ada dapat member kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. Oleh karena menimbulkan masalah, maka kinerja harus ditinjau kembali dan ditata ulang agar menuai kinerja yang sesungguhnya (Dunn, 2000:109).

Permasalahan kebijakan publik, dalam hal ini adalah masalah pendidikan merupakan masalah terpenting dalam sumberdaya manusia. Sementara itu, Dunn mengetengahkan kajian tentang penyusunan agenda, adopsi, menyusun formulasi, implementasi, dan sistem penilaian yang harus dilakukan.



Gambar 2.5 : Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan (Dunn, 2000: 25)

Kerumitan dalam implementasi akan selalu terjadi. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diamanatkan dalam UU nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, bahwa terdapat hubungan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan (Wijatno, 2009:30). Berikut akan dijelaskan satu persatu mengenai penyelenggaraan pendidikan dan strategi perusahaan melalui program CSR.

Dalam hal pendidikan PBB telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikemas dalam agenda MDGs (*Millenium Development Goals*), agenda ASEAN mengeluarkan kebijakannya yang termuat dalam deklarasi AEC (*Asean Economic Community*) sejak November 2007, yakni elemen tenaga kerja terdidik, dan daya saing internasional. Sementara itu Indonesia menyambut komunitas ekonomi ASEAN dengan mencanangkan empat pilar yang didalamnya mengandung komunitas integrasi agar siap menghadapi daya saing di kawasan global, dan untuk menindak lanjuti program MDGs atau TPG (Tujuan Pembangunan Milenium). Khusus peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dalam hal pendidikan dan sosial diusahakan oleh kelompok pemerintah daerah, sektor swasta, dan atas swadaya masyarakat. Terkait hal tersebut Hitt (2007: 32) menggarisbawahi betapa pentingnya melihat perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh organisasi secara objektif dari pihak luar.

Kebijakan tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) dinyatakan bahwa bentuk satuan pendidikan dibagi dalam tiga hal (UU no. 20 tahun 2003, pasal 13), penyelenggaraan pendidikan antara lain meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal yang diperuntukkan bagi pendidikan keluarga dan lingkungan.

Masalah kebijakan pendidikan, yang didalamnya adalah merupakan nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan politik (Dunn, 2000: 107). Merujuk pada kebijakan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan belum memadai terutama di wilayah industri baru, kawasan industri yang sering menimbulkan masalah. Masalah lingkungan industri merupakan kompetisi yang tak dapat dielakkan, karena disana terjadi kecemburuan sosial dan pengangguran, atau tingkat putus sekolah yang mengakibatkan pengangguran. Oleh pimpinan perusahaan, dan dalam unit terkecil diciptakan SOP (*standard operating procedure*), menuju tindakan riil untuk melaksanakan implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan, dewasa ini memiliki standard tertentu yang tertuang dalam sistem manajemen internasional (ISO, *internasional standard organization*), pemerintah daerah kota dan kabupaten sebagai UPT menjalankan program pelayanan layanan minimum pendidikan (SPM bidang pendidikan).

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, metode yang dipergunakan adalah dengan metodologi kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menekankan pada proses-proses dan makna-makna yang tidak diukur secara ketat dari segi jumlah, intensitas, maupun frekuensi (Denzin dan Lincoln, 1994 dalam Sitorus, 1998). Selama mengadakan penelitian di kawasan tertentu, dengan waktu tertentu, dan dengan informan yang tertentu, maka dipandang perlu dan cocok apabila menggunakan metodologi kualitatif. Sebenarnya dalam penelitian terdapat berbagai metodologi, Soegiyono (2009) berpendapat bahwa metodologi yang dilakukan dalam penelitian terbagi beberapa cara, yakni kualitatif, kuantitatif atau gabungan diantara keduanya. Dengan tiga cara ini sudah barang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Telaah wawancara, observasi dan sistem dokumentasi dilakukan pada waktu dan tempat tertentu.

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penulis akan mendapatkan data dan informasi yang akurasinya dapat terjamin, terbaru dan terpercaya. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi sumber data (triangulasi) yakni dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Sumber informasi ditentukan secara *purposive sampling* dan *snowballing* dengan responden ditentukan dari petunjuk responden sebelumnya. Metode etnografi digunakan untuk menghimpun informasi wawancara dan pengamatan. Makna kualitatif penelitian ini juga dalam hal posisi peneliti terhadap subyek penelitian dalam relasi subyek-subyek (*intersubjectivity*).

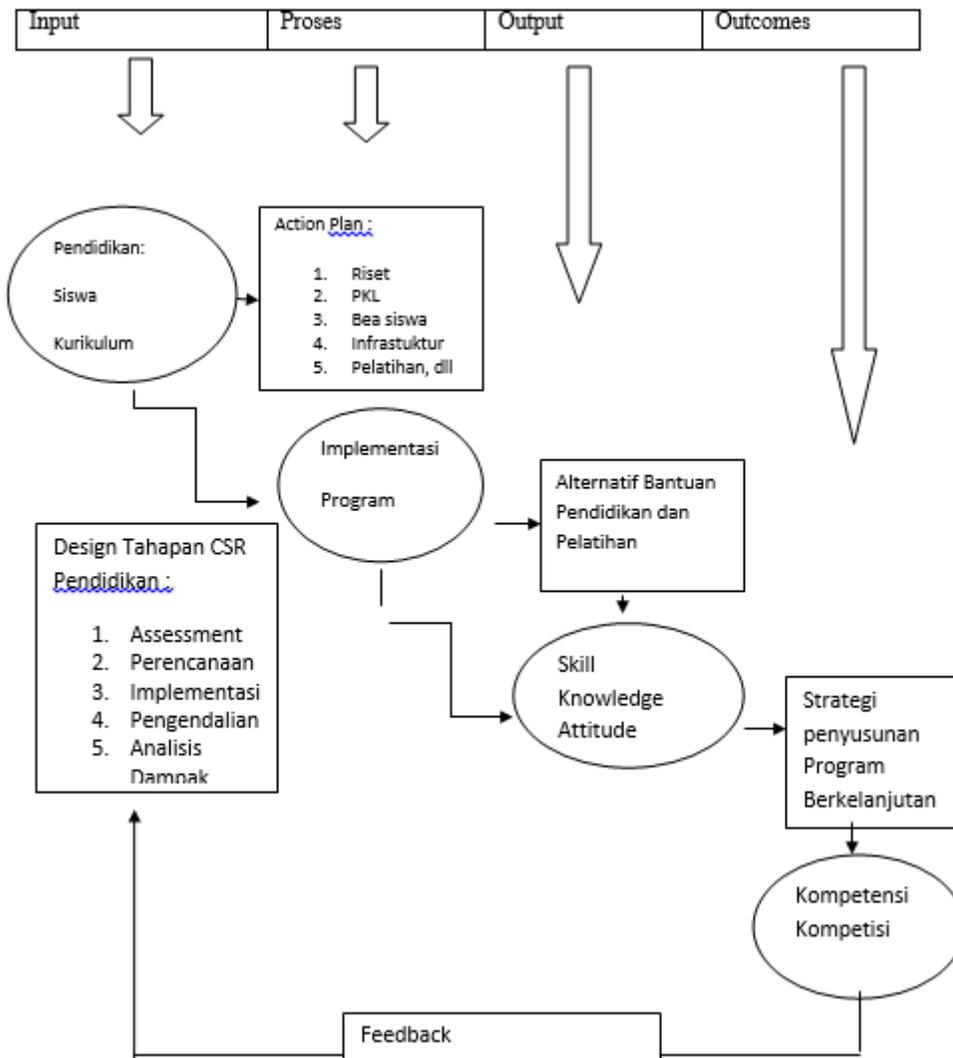
Efektivitas yang dimaksud adalah keefektifan program CSR pendidikan, sehingga pada penelitian ini akan dilihat mulai *assessment* CSR pendidikan, perencanaan, implementasi,

evaluasi hingga dampaknya yang terjadi akibat pelaksanaan CSR, sehingga perubahan-perubahan yang tidak terkait dengan CSR tidak akan diteliti. Pada penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang didapatkan dari informan, responden dan *stakeholder*. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk mencari informasi faktual secara mendetail yang sedang menggejala dan mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapat justifikasi keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan (Singarimbun dan Effendi, 2006).

Penelitian ini dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, dilakukan di Kawasan Industri Bogor, tepatnya diwakili oleh Kecamatan Citeureup, Babakan Madang, Gunung Putri dan Cileungsi, yang terdiri dari desa binaan dan kampung-kampung baru, yakni di Desa Citeureup, Desa Puspanagara, Desa Tajur, Desa Hambalang, Desa Lulut, Desa Gunungsari, Desa Nambo, Desa Bantarjati, Desa Narogong, Desa Gunung Putri, Desa Kranggan, Desa Cileungsi, Desa Leuwi Karet, Desa Tarikolot dan Desa Leuwi Nutug. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), memilih tiga perusahaan besar, Indocement Heidelberg dipilih menjadi kasus penelitian karena meraih CSR Award 2008 dan tahun 2013 kategori sosial-lingkungan dan

Peringkat Emas PROPER 2009 hingga tahun 2013 terus menerus mendapat Peringkat Emas. Holcim group dipilih menjadi kasus penelitian karena juga meraih CSR Award 2008 dan tahun 2013 kategori sosial-lingkungan dan Peringkat Emas PROPER 2009 hingga tahun 2013 terus menerus mendapat Peringkat Emas. Kondisi yang sama juga terjadi pada Bogasari Group. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2011 hingga bulan Februari 2012. Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan literatur dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pendekatan teoritis.

Model konseptual sesuai dengan gambar (visualisasi proses), dengan mengetengahkan masukan – proses – keluaran – dan azas manfaat, dapat dijelaskan secara sederhana. Kunci utama adalah melaksanakan program sesuai dengan rencana. Model ini disusun memiliki makna dan tujuan, yang diharapkan dalam implementasinya dapat berjalan dengan tepat, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tentu saja dalam model konseptual yang sederhana ini mengandung tujuh criteria, yang rasional (dapat didasari atas perhitungan dan pengukuran), memiliki tujuan, menentukan memperkirakan asumsi, ada visualisasi, strategi implementasi, indicator keberhasilan, dan dapat dievaluasi.



Gambar 4. : Model konseptual tentang implementasi CSR pendidikan yang efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program CSR bidang pendidikan bagi masyarakat sekitarnya. Implementasi ini sesuai dengan program perusahaan yang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, memberikan perhatian kepada siswa dan mahasiswa berupa bea siswa dan mengadakan riset, serta penulisan karya tulis. Program CSR pendidikan merupakan sistem yang dicanangkan yang berkaitan dengan efektivitas program melalui *essessment* CSR bidang pendidikan, perencanaan, implementasi, pengendalian dan dampak atas bantuan tersebut. Program tersebut adalah :

- a) Bantuan pembuatan sarana dan prasaana untuk sekolah (pendidikan)
- b) Bantuan laboratorium, alat tulis buku, kelengkapan siswa, dan lain-lain
- c) Kunjungan siswa (study visit)
- d) Pelatihan dan pendidikan, pengembangan masyarakat
- e) Praktek kerja lapang (PKL), praktek kerja industri (prakerin), KKN
- f) Program beasiswa

Program SCR meliputi : pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, keamanan dan keselamatan lingkungan, reklamasi dan kerjasa dengan perguruan tinggi, pemberdayaan bidang pertanian perikanan dan peternakan. Untuk itu, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat

pendidikan dapat diterangkan ke dalam *perceptual mapping resources authority* (peta atas penguasaan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan), perusahaan besar telah memanfaatkan sumberdaya alam dan sekaligus mempekerjakan ribuan karyawan. *Perceptual mapping* bantuan kependidikan dari perusahaan. Terdapat empat posisi yang berbeda, besar atau kecilnya bantuan perusahaan, besar atau kecilnya kebutuhan pendidikan.

Assessment merupakan penilaian, pengkajian, pengukuran, pertimbangan, penelaahan terhadap kebutuhan masyarakat lingkungan perusahaan, dan secara khusus kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga

assessment CSR untuk bantuan berupa barang jasa yang dinilai akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, dan berperan dalam berbagai hal seperti berfungsi sebagai perbaikan infrastruktur, mempermudah transportasi, membantu menjaga kebersihan, dan Assessment dilakukan untuk mengetahui jumlah sekolah dan siswa yang mendapat bantuan, infrastruktur penunjang pendidikan, pelatihan yang sesuai kompetensinya. Anggaran tersebut dibuat bersamaan dengan penyusunan perencanaan tahunan, dan yang terpenting adalah perusahaan harus mengeluarkan dana bantuan.

Table 4. 1. Bantuan produk riil dan produk jasa langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan

Bentuk Program CSR Bidang Pendidikan	Produk Riil	Produk Jasa
Holcim Group	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Bantuan pembuatan jalan dan gang menuju sekolah 3. Bantuan laboratorium dan fasilitas belajar 4. Bantuan bea siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan menjahit 2. Pelatihan perdagangan 3. Pelatihan guru SD dan SMP 4. Penyelenggaraan praktek kerja, studi visit
Bogasari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan jalan menuju sekolah 2. Perbaikan fasilitas sekolah 3. Bantuan bea siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pembuatan kue 2. Lomba karya tulis tentang gizi dan pangan 3. Penyelenggaraan praktek kerja, studi visit
Indocement Heidelberg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan gedung sekolah TK, SD, SMP, SMA 2. Pembuatan infrastruktur, dan fasilitas penunjang ke sekolah 3. Perbaikan fasilitas sekolah 4. Bantuan bea siswa 5. Donasi semen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peternakan 2. Pelatihan perikanan 3. Pelatihan agribisnis 4. Pelatihan teknik dan bengkel las 5. Pelatihan mengemudi 6. Penyelenggaraan praktek kerja, studi visit

Sumber : Bina Lingkungan di Kawasan Industri Bogor (diolah)

Program CSR pendidikan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah adalah untuk mewujudkan daya saing dan siap menghadapi kompetisi. Maka dari itu untuk perencanaan CSR pendidikan diperlukan planning pembuatan sarana, fasilitas yang sesuai dengan tata letak daerah tersebut, guna mendukung SPM, IPM dan MDGs. Assessment CSR bidang pendidikan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah perkiraan dan penilaian atau prediksi mengenai jenis bantuan pendidikan yang meliputi :

- a) Sekolah mana saja dan perguruan tinggi mana yang akan dibantu
- b) Desa mana saja yang menjadi prioritas perhatian
- c) Mahasiswa dari perguruan tinggi mana yang akan diberikan bea siswa
- d) Seberapa besar jumlah dana yang dianggarkan untuk membantu pendidikan
- e) Perkiraan waktu yang tepat untuk menyusun anggaran dan pemberian dana
- f) Sistematis pemberian dana (implementasi program) yang akan disusun

g) Strategi implementasinya agar terwujud

Perencanaan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah adalah untuk mewujudkan daya saing dan siap menghadapi kompetisi. Kajian kebutuhan pendidikan terkait dengan CSR pendidikan, selain melakukan *assessment* dan *planning* seperti tersebut di atas, selanjutnya untuk kebutuhan CSR pendidikan adalah sebagai berikut :

- a) Mempelajari dan merencanakan kebutuhan sekolah-sekolah terutama sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tingkat atas yang ada di kecamatan dan kabupaten tempat perusahaan tersebut melakukan produksi
- b) Mempelajari kebutuhan praktek langsung di lapang, terutama di sekolah menengah tingkat atas profesi (sekolah menengah kejuruan) yang ada di kecamatan dan kabupaten tempat perusahaan tersebut melakukan produksi
- c) Mempelajari kebutuhan perguruan tinggi yang berdekatan dengan perusahaan tersebut (terutama perguruan tinggi negeri di kabupaten atau provinsi tempat perusahaan beroperasi
- d) Mempelajari fakultas dan jurusan yang terkait dengan perusahaan mulai dari input, proses dan out put yang ada di perusahaan tersebut, dsb.
- e) Mempelajari kebutuhan perusahaan itu sendiri terkait dengan kajian atau penelitian apa yang diperlukan perusahaan yang ada hubungannya langsung dengan jalannya kegiatan perusahaan
- f) Melibatkan para pemangku kepentingan terkait dengan dunia pendidikan, terutama yang ada di wilayah perusahaan tersebut, untuk bersama-sama menentukan arah kebijakan pelaksanaan CSR pendidikan.

Kebutuhan pendidikan formal, non formal, dan informal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Perencanaan disusun sesuai dengan mekanisme dan peraturan serta persyaratan umum, berisi juga mengenai dana bantuan (budget), antara lain :

- a) Perencanaan dalam pemberian beasiswa siswa dan mahasiswa
- b) Penyusunan rencana jadwal PKL (prakerin) dari sekolah menengah kejuruan dan mahasiswa sesuai kompetensi

- c) Perencanaan *Study visit* dari instansi sekolah dan institusi lain
- d) Perencanaan terhadap bantuan sarana dan prasarana pendidikan
- e) Perencanaan pelatihan (pendidikan non formal)

Tahap pelaksanaan atau implementasi merupakan hal yang paling penting, sebagai tindakan nyata (riil) dilaksanakan sesuai rencananya. Tiga perusahaan yang menjadi tempat kajian telah mengimplementasikan CSR bidang pendidikan, Holcim Group, Bogasari Group, Indocement Heidelberg Group. Teknis pelaksanaan pemberian bantuan adalah secara langsung kepada siswa atau mahasiswa melalui institusinya, dan secara tidak langsung. Besaran berapa jumlah pendanaan yang sudah harus disiapkan dalam anggaran tahunan. Beasiswa untuk anak karyawan pada umumnya diberikan pada karyawan golongan tertentu (sedang ke bawah), dan memiliki prestasi di sekolahnya. Bantuan beasiswa untuk putra-putra karyawan pada umumnya hanya dilakukan di perusahaan-perusahaan skala besar, dengan besarnya dana yang diberikan sama dengan bantuan untuk masyarakat umum.

Manfaat beasiswa bagi mahasiswa antara lain untuk membantu membayar uang kost, membeli alat tulis, bahkan alat komunikasi, kebutuhan makan dan minum, bahkan membantu orang tuanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan semangat belajar agar mempertahankan nilai, dan mengejar cita-citanya. Adapun langkah-langkah yang umumnya dilakukan perusahaan-perusahaan di kawasan industri Bogor, antara lain adalah:

- a) Perusahaan menugaskan karyawannya yang mempunyai kemampuan, komitmen, yang disertai tanggung jawab (*person in charge/PIC*) terhadap CSR pendidikan, atau dari bagian lingkungan.
- b) Melakukan kegiatan *monitoring* pada pelaksanaan dan pada kemajuan kegiatan CSR pendidikan sesuai dengan mekanisme *monitoring* yang sudah direncanakan.
- c) Melakukan evaluasi kegiatan CSR pendidikan, terutama pada program-program yang telah berjalan, dan sekaligus mendokumentasikan kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai.
- d) Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk menjamin agar kegiatan CSR pendidikan yang sedang dan telah berjalan dapat

dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Azas manfaat diberikan bantuan sesuai dengan yang disepakati dan dikategorikan melalui distribusi

dan alokasi dana bantuan, seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Alokasi dan makna bantuan program CSR pendidikan

Menjelang smester atau kenaikan kelas	Distribusi dan alokasi Sekitar kawasan	Makna , azas manfaat
Siswa sekolah Dasar	Distribusi ke sekolah dasar di wilayah Bogor	Siswa yang mendapat bantuan CSR
Siswa Sekolah Menengah Pertama	Distribusi dan alokasi bantuan langsung	Menambah daya tampung lulusan SD
Siswa SMA / MA/ SMK	Distribusi dan alokasi langsung	Menambah daya tampung lulusan SMP
Mahasiswa	Wilayah Bogor, dan Perguruan Tinggi di P Jawa dan luar Jawa.	Sifat membantu dan menunjang aktivitas pembelajarannya

Bentuk bantuan kepada Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, tidak memandang apakah sekolah baru atau lama. Untuk perguruan tinggi yang jaraknya relative jauh akan mendapat pertimbangan

tersendiri. Biasanya mahasiswa akan diundang ke perusahaannya sebagai sosialisasi kepedulian perusahaan terhadap pendidikan, dan ini akan membawa dampak positif.

Tabel 4. Jenis-jenis bantuan yang diberikan pada kegiatan pendidikan formal

No	Subyek Bantuan	SD	SMP	SMA	SMK	Perg Tinggi
1	Bea Siswa	√	√	√	√	√
2	Peralatan Sekolah	√	√	√	√	√
3	Laboratorium	√		√	√	√
4	Buku bacaan – Perpustakaan	√	√	√	√	√
5	Perbaikan gedung	√	√	√	√	
6	Pembuatan Gedung Baru	√	√	√		
7	Pengelolaan Perpustakaan	√	√	√	√	
8	Kesehatan Lingkungan Sekolah	√	√	√	√	√
9	Pelatihan Bagi Guru, dan masyarakat	√	√	√	√	√
10	Plant Visit, Studi Karya		√	√	√	√
11	Praktek Kerja Lapangan, Prakerin				√	√

Sumber : Kawasan industri Bogor (diolah, 2010)

Sistem pengendalian sebenarnya terletak pada kondisi perusahaan, yakni masalah dana keuangan (financial). Namun demikian, pengendalian tergambar pada kepentingan manajemen yakni aspek SDM, kebutuhan lingkungan, operasional mesin produksi, sistem yang dilakukan, financial, dan bahan baku.

Sistem pengendalian dilakukan secara terus menerus melalui monitoring dan evaluasi program. Pengendalian terhadap beban biaya yang dikeluarkan ini tidak begitu mempengaruhi perusahaan karena nilai persentasenya sangat kecil.

Namun demikian, sebenarnya bagi dunia pendidikan memiliki nilai relative besar. Dari tiga

perusahaan yang menjadi focus kajian memiliki dana CSR lebih dari seratus milyar, agar dilakukan lebih efisien dan efektif.

Sistem pengendalian CSR pendidikan adalah salah satu bagian dari sistem manajemen, yang berperan untuk mengendalikan program yang sudah diperkirakan (*assessment*), dan sudah direncanakan serta selanjutnya diimplementasikan oleh suatu perusahaan. Pengendalian ini terletak pada pimpinan perusahaan sebagai peyandang dana CSR Pendidikan. Tujuan dari pengendalian dari implementasi bantuan CSR pendidikan ini adalah agar implementasi atau pelaksanaan bantuan CSR pendidikan tersebut terarah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan.

Seiring dengan program CSR bidang pendidikan, terdapat perubahan paling nyata adalah penyelenggaraan pendidikan. Dengan pola dan sistem teratur dan semakin pasti, bidang pendidikan semakin hari semakin merasakan manfaatnya. Dengan sistem penilaian (perkiraan, dan penilaian), pelaksanaan program yang efektif, maka para siswa dan mahasiswa di sekitar perusahaan semakin semangat untuk berkompetisi.

Citra (image) positif yang terlihat secara kasat mata dari bantuan CSR pendidikan antara lain adalah :

- a) Sebagai bentuk bantuan dapat berfaedah dan berguna untuk meningkatkan citra sekolah, dan perguruan tinggi. Kegiatan pelaksanaan CSR pendidikan akan menjadikan sekolahnya berani berkompetisi dengan daerah lain, dengan berbagai catatan bahwa program dapat diteruskan sesuai dengan perkembangan. Fasilitas dan lingkungan sekolah yang lebih rapih dan tertata dengan baik.
- b) Pelatihan terhadap guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat dapat meningkatkan potensinya.
- c) Masyarakat sekitar kawasan industri yang serius ingin mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, meningkat kompetensinya dan lebih berdaya serta lebih mandiri.

- d) Siswa/mahasiswa dapat mempraktekan teori yang didapat di bangku sekolah pada saat melakukan PKL/prakerin
- e) Mahasiswa dapat melakukan penelitian dengan mudah dan biaya yang dibantu perusahaan, serta dapat memperbanyak tempat untuk koas, *internship* atau magang
- f) Siswa atau mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dapat meraih cita-citanya melalui bantuan beasiswa dari perusahaan.

Berikut ini diketengahkan mengenai pembahasan atas hal-hal yang ditemukan selama penelitan, dan sekaligus akan dijelaskan mengenai model konseptual implementasi CSR pendidikan. Pembahasan berkisar pada hasil temuan seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni mengenai *assessment*, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan dampaknya. Kelima alat tersebut merupakan sistem pendekatan yang dikaji, yang didalamnya mengandung uraian kegiatan pelaksanaan program meliputi praktek kerja, bantuan beasiswa, study visit, pelatihan, bantuan sarana dan prasarana (infrastruktur), dan lain-lain yang berkaitan dengan bantuan kependidikan. Perusahaan-perusahaan berskala besar maupun skala kecil sudah melakukan kegiatan CSR pendidikan, bahkan pelaksanaannya sudah dilakukan jauh sebelum adanya perundang-undangan.

Aspek azas kekeluargaan tercermin dalam pelaksanaan bantuan khususnya melalui program yang rutin dan terkendali. Bantuan terhadap infrastruktur, khususnya terhadap lingkungan sekolah dasar dan menengah telah dilakukan sebatas kebutuhan sekolah, perbaikan ruang kelas, perbaikan jalan yang ringan. Bantuan tersebut tidak mengikat, dan hanya bersifat sosial secara langsung, oleh karena itu masing-masing sekolah atau perguruan tinggi dapat mengajukan proposal yang tidak perlu diketahui oleh dinas pendidikan setempat. Dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai UPT, tidak memiliki kewajiban untuk menerima atau menyalurkan, sementara ini dan sejauh ini hanya menerima laporan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dan informasi yang diperoleh dan telah

diuraikan pada bab IV, pada akhirnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *Assessment* dalam bidang pendidikan di kawasan industri sangat perlu dan penting, yang berguna untuk menentukan langkah-langkah ke depan, khususnya dalam implementasi kebijakan CSR pendidikan.
2. Sistem perencanaan CSR pendidikan di Kawasan Industri Bogor belum dapat dilaksanakan efektif sebagai akibat adanya keinginan pencitraan dari masing-masing perusahaan yang terlalu kuat, sehingga setiap perusahaan tidak saling terbuka, bersifat rahasia, dan mengakibatkan bantuan yang diberikan ke sekolah atau pada desa sekitar tidak adil dan merata.
3. Implementasi CSR pendidikan di Kawasan Industri Bogor belum dapat dilaksanakan secara efektif. Sistematis distribusi dan alokasi dana tampak tumpang tindih terhadap kegiatan dan tujuannya, misalnya beasiswa, PKL, studi visit, bantuan infrastruktur, pelatihan (training, seminar, workshop). Penggunaan dana CSR terbesar lebih diperuntukkan kepada yayasan yang dibangun oleh perusahaan (yayasan internal), dan dana bantuan yang diberikan tidak disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pendidikan. Pelaksanaan (implementasinya) lebih banyak diarahkan pada hal-hal yang bersifat politik mercusuar.
4. Sistem pengendalian CSR pendidikan di Kawasan Industri Bogor sudah dilakukan, namun perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien, sebab yang terlihat dari adanya program-program yang belum tepat sasaran, belum tepat waktu dan belum tepat guna, dan CSR pendidikan bukan menjadi prioritas utama. Dampak CSR pendidikan di Kawasan Industri Bogor memiliki dampak positif dan negative.
5. Wacana perwujudan meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana digariskan oleh SPM, IPM, dan MDGs masih sangat kecil, diperlukan kerja lebih cerdas dan kerja keras.

Setelah melakukan analisis terkait dengan program CSR dan pendidikan di lokasi kajian, agar program CSR pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan penelitian lanjutan, yakni:

- a) Pemanfaatan dana CSR lebih mengedepankan bidang pendidikan. Meningkatkan hubungan industrial pendidikan antara perusahaan, sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
- b) *Future research* adalah seberapa jauh tanggung jawab pendidikan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan di daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Allenby, B.R. (1999). *Industrial Ecology: Policy Framework and Implementation*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Alma, B. (2005). *Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, B. dan Hurriyati, R. (2009). *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan: Fokus Pada Mutu dan Pelayanan Prima*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, B. (2010). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ambadar, J. (2008). *Corporate Social Responsibility – CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Arikewuyo, M.O. (2009). “Professional Training of Secondary School Principals in Nigeria: A Neglected Area in the Educational System”. *Florida Journal of Educational Administration & Policy*, 2, (2), 73-84.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Statistik Kabupaten Bogor. (2005). *Kabupaten Bogor Dalam Angka*. Bogor: BPS-Badan Statistik Kabupaten Bogor.
- Banghart, F.W. dan Albert Jr. (1973). *Educational Planning*. New York: The Macmillan Company.
- Baptiste, H.P. dan Townsend, K. (2008). “Examining the Presidential Libraries: Students Find Biases and Recommend a

- Multicultural Perspective". *Multi Culture Education*, **16**, (1), 48-52.
- Barnett, B. (2010). "Getting "Real" About Teaching Effectiveness and Teacher Retention". *Journal of Curriculum and Instruction*, **4**, (1), 1-15.
- Barnett, B. (2010). *Elementary Mathematics Teacher Preparation in an Era of Reform: The Development and Assessment of Mathematics for Teaching*. Hillsborough: The Center for Teaching Quality.
- Bray, N.J. (2008). "Proscriptive Norms for Academic Deans: Comparing Faculty Expectations Across Institutional and Disciplinary Boundaries". *The Journal of Higher Education*, **79**, (6), 692-721.
- Cheri, L. (2007). "Metaphor and pedagogy in the design practicum". *Internation 308 Technology Des Education*, **1** 1126
- Covey, S.R. (2004). *The 8th Habit from Effectiveness to Greatness*. New York: Free Press.
- Crockett, J.B. (2004). "Taking stock of science in the schoolhouse: Four ideas to foster effective instruction for students with learning disabilities". *Journal of Learning Disabilities*, **37**, 189–199.
- Crockett, J.B. (2007). "The Changing Landscape of Special Education Administration". *Exeptionality*, **15**, (3), 139–142.
- Dahlan, A., Hadisumardjo, H. dan Kasiadi. (1998). "Mengenal Kawasan Industri Cibinong". *Buletin Warta Indocement*, **5**, (3), 38-39.
- Dahlan, A., Hadisumardjo, H. dan Kasiadi. (1999). *Potret Pendidikan, Sosial, Budayadan Agama di Kawasan Industri Cibinong*. Bogor: YPP Insani Bogor.
- Davis, M. dan Carroll, J. (2009). "Formative feedback within plagiarism education: Is there a role for text-matching software?". *International Journal for Educational Integrity*, **5**, (2), 58-70.
- Deem, R., Hillyard, S. dan Reed, M. (2007). *Knowledge, Higher Education, and the New Managerialism: The Changing Management of UK Universities*. Oxford University Press.
- Denton, H. dan McDonagh, D. (2003) "Using Focus Group Methods to Improve Students' Design Project Research in Schools: Drawing Parallels from Action Research at Undergraduate Level". *International Journal of Technology and Design Education*, **13**, 129–14.
- Departemen Perindustrian. (2005). *Industri Dalam Angka*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Díaz, B. dan Ángel. (2009). "Assessment in Mexican Education: An Excess of Programs and Absence of the Pedagogical Dimension". *Sísifo. Education Sciences Journal*, **09**, 19-30.
- DiPaola, M.F. dan Walther-Thomas, C. (2002). *Principals and special education: The critical role of school leaders*. Center on Personnel Studies in Special Education, University of Florida. [Online]. Tersedia: <http://www.copsse.org> [9 September 2011]
- Dirdjojuwono, R.W. (2004). *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasi*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Panduan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (Penprinas MP3EI 2011 – 2025)*, Jakarta: Dikti.
- Dirk, S. (2009). *Performance of Blended Learning in University Teaching, Determines and Challenges*. [Online]. Tersedia: <http://eeced.campussource.de/archive/6/2627/e> [9 September 2011]
- Djajadiningrat, S.T. (2001). *Untuk Generasi Masa Depan "Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan"*. Bandung: Departemen Teknik Industri. Fakultas Teknologi Industri, ITB.
- Dunn, W. (2004). *Public Policy an Introduction, 3rd edition*. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Dunn, W. Wibawa, S (Penterjemah) (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Ellen, G. dan Patrick, S. (2009). "The Changing Context of K–12 Education Administration: Consequences for Education. Program Design and Delivery". *Peabody Journal of Education*, **84**, 9–43.
- Eriyatno. (2011). *Membangun Ekonomi Komparatif, Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Fendri. (2008). *Strategi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Pemerintah: Studi Kasus Program Pemberdayaan Masyarakat PT RAPP, CECOM dan Pemerintahan Kota Pekanbaru*. Master Thesis pada MPD IPB Bogor: Tidak diterbitkan.
- Ford, A. (1999). *Modeling the Environment: An Introduction to System Dynamics Models of Environmental System*. Washington: Island Press.
- Gaudêncio, F. (2009). "Conferences School and work in a historical perspective: contradictions and controversies". Makalah pada 17th Afirse Debate — Portuguese Section, "School and the world of work", Lisbon.
- Hitt, M.A., Hoskisson, R.E., dan Ireland, R.D. (2007). *Management of Strategy: Concepts and Cases*. Mason: Thomson South Western.
- Hockman, M. (2005). "Curriculum Design and Tertiary Education". *International Journal of Mathematical Education*, **36**, (2), 175-191.
- Howard, D. (2003). "Using Focus Group Methods to Improve Students' Design Project Research in Schools: Drawing Parallels from Action Research at Undergraduate Level". *International Journal of Technology and Design Education*, **13**, 129–144.
- Hoy, W.K. dan Miskal, C.G. (2008). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. Boston: McGraw Hill Higher Education.
- Hubeis, A.V.S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor : IPB Press.
- Hunger, J. D. dan Wheelan, T. (2000). *Strategic Management*. New Jersey : Prentice Hall.
- International Standard Organization 26000. (2007). *Guide on Social Responsibility*. [Online]. Tersedia: www.iso.org/iso/iso26000 [12 Desember 2012]
- Irianto, S. (2012). *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ishikawa, K. (1985). *What is Total Quality Control? The Japanese Way*. New York: Prentice – Hall Inc.
- Jedamus, P. dan Peterson, M.W. (1980). *Improving Academic Management: A Handbook of Planning and Institutional Research*. San Fransisco: Jossey Bass Publishing.
- Jessica, A.P. (2010). "Preparing Pre-service Teachers for Multicultural Classrooms". *Australian Journal of Teacher Education*, **35**, (2), 35-48.
- Johnson, S.L. dan Rush, S.C. (1995). *Reinventing the University: Managing and Financing Institutions of Higher Education*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Julijanti, N. (2008). *Persepsi Masyarakat Terhadap Program-Program Corporate Social Responsibility PT. Aqua Golden Mississippi, (Studikamus di Desa Babakanpari, Kecamatan Dahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)*. Master Thesis pada IPB Bogor: Tidak diterbitkan.
- Kajander, A. (2010). "Assessment & Evaluation in Higher Education". *Canadian Journal of Education*, **33**, (1), 228-255.
- Karakaya, A.F. (2006). "Rehearsal of professional practice: impacts of web-based collaborative learning on the future encounter of different disciplines". *International Journal Technology of Education*, **18**, 101–117.
- Kati, K., Tuki, K. dan Minna, T. (2007). "New Challenging Approaches to Engineering Education: Enhancing University–Industry Co-operation". *European Journal of Engineering Education*, **32**, (2), 167–179.
- Kawai, M. (2000). "The Resolution of The East Asian Crisis: Financial and Corporate

- Sector Restructuring”, *Asian Economics*, **11**, 133 – 168.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2009). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 tahun 2009: Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: KLH.
- Kennedy, J. E. (2009). *Era Bisnis Ramah Lingkungan: Strategi Marketing Communication Masa Depan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.
- Kim, W.C. dan Mauborgne, R. (2011). *Blue Ocean Strategy*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Kotler, P. (2004). *Corporate Social Responsibility: Six Option for Doing Good*. New York: Free Press
- Kotler, P. (2005). *Corporate Social Responsibility: Implementation*. New York: Free Press
- Levstik, L.S., dan Tyson, C.A. (2008). *Handbook of Research in Social Studies Education*. New York: Taylor & Francis e-Library.
- Levy, R. (2009). “No Child Left Behind: A Neoliberal Repackaging of Social Darwinism”. *Journal for Critical Education Policy Studies*, **7**, (1), 364-381.
- Madrazo, L. (2003). “System of Representation: A Pedagogical Model for Design Education in the Information Age”. *International Journal of Education. Digital Creativity*, **17**, (2), 73 – 90.
- Mangkuprawira, S. dan Padlinurjaji, I.M. (2008). *Membangun IPB Menuju World Class University: Hipunan Gagasan 21 Bakal Calon Rektor IPB 2007-2012*. Bogor: IPB Press.
- Mursitama, T, Hasan. M, Fakhrudin, I. (2011). *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, Teori dan Implementasi*. Jakarta : INDEF.
- Ministry of Education and Culture. (1998). *Education Development in Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- National Industrial Zoning Committee’s USA. (1967). *Industrial Zone. USA*.
- Ohlson, M. (2009). “Examining Instructional Leadership: A Study of School Culture and Teacher Quality Characteristics Influencing Student Outcomes”. *Florida Journal of Educational Administration and Policy*, **2**, (2), 102-113.
- Omar, A. dan Jerry, D. (2009). *Mathematical Self-Efficacy of Middle School Students Solving the Rubik Cube*. Texas: Department of Mathematics & Statistics, Texas Tech University.
- Ozdemir, A.A. dan Muammer, O. (2009). “An Analysis of the Curricula of Business Administration Departments in Turkish Universities With the Perspective of Civil Society Awareness”. *Journal of Education for Business*, **85**, (5), 313-317.
- Pandian, A. (2008). “Multiculturalism in Higher Education: A Case Study of Middle Eastern Students’ Perceptions and Experiences in Malaysian University”. *International Journal Educational Administration*, **4**, (1),33.
- Peters, M.H., Kethley, B. dan Bullington, K. (2005). “Course Design Using the House of Quality”. *Journal of Education for Business*, **80**, (6), 309-315.
- Rizky, A. dan Majidi, N. (2008). *Neo-Liberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E Publishing Company.
- Robinson, A. (2009). *The Evolution of Education has not been televised :Educational Inequalities and the Impact of Change Industrial Design: A Phoenix Reborn from the Ashes of Technology Education: A Case History The Technology Teacher* .Journal of Educational Administration. Springer Science + Business Media B.V. February 2009.
- Rudito, B. dan Famiola, M. (2007). *Etika Bisnis, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*.Bandung: Rekayasa Sains.
- Sa’ud, U.S. (2009). *Inovasi Pendidikan*. Bandung :Alfabeta.
- Sagala, A. (2003). *Aspek Tekno-Ekonomis Dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan*

- Industri (Industrial Estate/Industrial Park) dan Peranannya Dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Puslitbang Sumber Daya, Wilayah dan Lingkungan Hidup, Badan Litbang Industri dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Salminen-Karlsson, M. dan Wallgren, L. (2007). "The Interaction of Academic and Industrial Supervisors in Graduate Education: An investigation of industrial research schools". *Journal of Educational Administration*, **56**, (1), 77-93.
- Santosa, S. dan Hadisumardjo, H. (1998). "Pembinaan Lingkungan di kawasan Industri". *Warta Indocement*, **50**, 4-5.
- Satori, D. dan Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Serageldin, I. (1996). *Sustainability and Wealth of Nation First Step in an On-going journey Dalam Environmentally Suatainable Development Studiesa And Monograph Series, No. 5*. Washington DC: The World Bank.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, B. Perdanakusuma, J. dan Leksono, N. (2010). *MDGs Sebentar lagi: Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Dunia*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Sumaryo. (2009). *Implementasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Kasus di Provinsi Lampung*. Disertasi Doktor pada IPB Bogor: Tidak diterbitkan.
- Susanne, B. (2010). "Freire: Informal Education as Protest". *Journal for Critical Education Policy Studies*, **8**, (1), 161-180.
- Susanto, A. (2007) *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*. Jakarta : The Jakarta Consulting Group.
- Tattersall, C., Janssen, J., Van den Berg, B., Hummel, dan Hans, K.R. (2007). "Using IMS Learning Design to Model Curricula". *Interactive Learning Environments*, **15**, (2), 181 – 189.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- Urban Land Institute. (1975). *Industrial Development Handbook*. Washington DC: ULI
- Vicki, W. (2009). "Leading with Data". *Florida Journal of Educational Administration and Policy, spring 2009 Volume 2, Issues 2*
- Whittle, S.R. dan Murdoch-Eaton, D. (2005). "Curriculum 2000: Have Changes in Sixth Form Curricula Affected Students' KeySkills?". *Journal of Further and Higher Education*, **29**, (1), 61–71.